

**PERKEMBANGAN KEWAJIBAN PARA PIHAK UNTUK BERITIKAD  
BAIK DALAM PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN MENURUT  
PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008 DAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016,  
STUDI PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI  
WILAYAH D.I.YOGYAKARTA TAHUN 2017-2018**

**INTISARI**

**Oleh: Josephine Nita Kurniawan\*,  
Pembimbing: Laras Susanti\*\***

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 telah diganti oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pembaharuan PERMA yang dibuat berdasarkan kekurangan-kekurangan sebelumnya, memuat poin utama yaitu kewajiban beritikad baik dalam proses mediasi. Beberapa poin perubahan dalam PERMA 2016 diharapkan dapat merubah konsep itikad baik yang kontra produktif dalam proses bermediasi berdasarkan PERMA 2008.

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui: (1) perbandingan pengaturan kewajiban para pihak, (2) pelaksanaan kewajiban beritikad baik para pihak, serta (3) pengaruh pelaksanaan kewajiban beritikad baik terhadap keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Wilayah DIY pada tahun 2017-2018. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif-empiris, yang adalah penelitian yuridis-normatif dan diperkuat dengan menggunakan data empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan dari perkembangan kewajiban para pihak dalam menempuh mediasi telah berhasil memperbaiki kekurangan PERMA 2008. Hakim mediator wilayah DIY tidak pernah menyatakan para pihak tidak beritikad baik, namun hal tersebut tidak selalu bersesuaian dengan fakta yang terjadi. Terlaksananya kewajiban beritikad baik memungkinkan terlaksananya mediasi, namun tidak menentukan peningkatan keberhasilan mediasi.

**Kata Kunci:** itikad baik, mediasi

---

\* Mahasiswa S1 Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

\*\* Dosen Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

**THE DEVELOPMENT OF PARTIES'S OBLIGATION ACTING BASED  
ON GOOD FAITH IN COURT MEDIATION PROCEDURES IN  
ACCORDANCE WITH PERMA NUMBER 1 OF 2008 AND PERMA  
NUMBER 1 OF 2016, A LEGAL STUDY CONCERNING THE  
IMPLEMENTATION OF MEDIATION IN THE DISTRICT COURT OF  
D.I.YOGYAKARTA 2017-2018**

**ABSTRACT**

**Author: Josephine Nita Kurniawan\*,  
Supervisor: Laras Susanti\*\***

PERMA Number 1 Year 2008 concerning the Procedure in Court Mediations has been replaced by PERMA Number 1 Year 2016. In regards to the update of the PERMA concerned, which is based on previous shortcomings, it contains the main points, namely the obligations to act based on good faith during mediation processes. Some changes in PERMA 2016 are expected to alter the concept of good faith that is ineffectual in mediation process based on PERMA 2008.

This legal study aims to identify the comparison of obligations owned by parties, the implementation of obligations owned by parties to act based on good faith, as well as the the effect of implementing the obligations based on good faith towards the success of mediation in the District Court D.I.Yogyakarta in 2017-2018. The research method used is a normative-empirical method, showing that juridical-normative research and strengthened using empirical data.

The results of the study indicate that changes in the development of the obligations of the parties to perform mediation have succeeded in improving the shortcomings of PERMA 2008. The judge as mediator in D.I.Yogyakarta has never stated that his parties did not act based on good faith. However, this does not always correspond to the facts that occur. The obligation to act based on good faith enables mediation to take place, but it does not determine the success of mediation.

Keywords: *good faith, mediation*

---

\* Undergraduate Student of Legal Science under Civil Law Department, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada.

\*\* Lecturer under Civil Law Department, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada.